PENYELESAIAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN KEADAAN : STUDI KASUS PUTUSAN 214/Pdt.G/2014/PN.JktSel

Rania Syifa Busroni¹, Chairunnisa Salsabila Putri², Calista Azarine Larissa³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

22106118318@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611283@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611291@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *This research discusses the resolution of contractual disputes involving abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden), using Case Decision Number 214/Pdt.G/2014/PN.JktSel as a study. Abuse of circumstances occurs when one party, under duress or economic hardship, is exploited by another party for unfair gain. The study employs a normative legal research method, focusing on statutory regulations and court decisions. The findings show that the judge thoroughly considered evidence indicating an imbalance in bargaining power between the parties and partially granted the counterclaim to protect the weaker party. This decision reflects the application of justice principles in contract law and highlights the importance of formally recognizing the doctrine of abuse of circumstances in Indonesian civil law.*

Keywords: *Abuse Of Circumstances, Breach Of Contract, Agreement, Civil Law, Legal Protection.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan studi kasus Putusan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN.JktSel. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam kondisi terdesak dan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara mendalam bukti dan fakta yang mengarah pada adanya ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian dan memutuskan sebagian gugatan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah. Putusan ini menjadi contoh penerapan asas keadilan dalam hukum perjanjian serta pentingnya pengakuan yuridis terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Keadaan, Wanprestasi, Perjanjian, Hukum Perdata, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu menjalin kerja sama sebagai upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-harinya, baik melalui aktivitas pertukaran barang maupun pelaksanaan berbagai bentuk perjanjian yang telah berkembang menjadi semakin kompleks.¹ Bentuk dan isi dari perjanjian-perjanjian tersebut pun menjadi semakin beragam, baik secara lisan maupun tertulis.

Pada prinsipnya, hubungan hukum dapat timbul baik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat. Ketentuan mengenai perjanjian secara yuridis diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas tentang perikatan. Berdasarkan KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²

Kenyataannya, tidak semua perjanjian berlangsung dalam kondisi tanpa tekanan. Dalam situasi tertentu, ada pihak yang membuat perjanjian karena terpaksa, lemah, atau tidak seimbang secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Kondisi ini dapat menyebabkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana seseorang memanfaatkan situasi sulit atau tekanan yang dihadapi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menetapkan tiga alasan utama yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perjanjian akibat adanya cacat dalam kehendak para pihak. Ketiga alasan tersebut meliputi: kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1322 BW; paksaan (*dwang*), yang diatur dalam Pasal 1323 hingga Pasal 1327 BW; dan penipuan (*bedrog*), yang ketentuannya tercantum dalam Pasal 1328 BW.³ Selain alasan-alasan pembatalan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pula putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian atas dasar adanya pertimbangan hakim bahwa perjanjian tersebut mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)⁴

¹ Saija, R. (2016). Penyalahgunaan Keadaan oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 3, 181.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1313.

³ Rahmayani, D. A. (2019). TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENJADI JUAL BELI TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 192 PK/PDT/2014).

⁴ Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 36.

Pada awalnya, Doktrin mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai dasar untuk membatalkan perjanjian berkembang melalui praktik peradilan di Belanda, khususnya melalui pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan hakim (yurisprudensi). Seiring dengan diberlakukannya amandemen terhadap *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), doktrin ini kemudian diakomodasi secara normatif dalam ketentuan Pasal 3:44 ayat (1) NBW sebagai salah satu alasan tambahan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian, selain ancaman (*bedreiging*) dan penipuan (*bedrog*).⁵

Penyalahgunaan keadaan seringkali muncul dalam konteks perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Posisi debitur dalam banyak kasus seringkali terabaikan, dan debitur seringkali berada dalam posisi yang terpojok, sehingga dalam situasi yang mendesak, debitur tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Akibatnya, perjanjian kredit cenderung mendekati bentuk perjanjian baku, di mana seluruh ketentuan kredit dan klausul-klausul yang ada sepenuhnya ditentukan oleh kreditur, sehingga hampir selalu menguntungkan pihak kreditur.⁶ Pada umumnya, tanah kerap kali dijadikan jaminan utama dalam kasus utang piutang mengingat manfaatnya sebagai aset yang cenderung meningkat nilainya dari waktu ke waktu, sehingga menjamin kepastian dan berpotensi menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman.⁷

Salah satu contoh kasus yang menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan dapat dilihat pada sengketa Nomor Putusan 214/Pdt.G/2014/PN.JktSel. Dari kasus tersebut telah di putuskan pada tahun 2014, terdapat alasan dalil penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Putusan ini membuktikan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat dan telah dijadikan dasar dalam peradilan di Indonesia. Penelaahan terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat memberikan gambaran lebih dalam mengenai dinamika antara asas kebebasan berkontrak, prinsip keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana

⁵ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 48.

⁶ Fadillah, R., & Fatahillah, F. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2).

⁷ Saragih, G. C., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Tanah Milik Orang Lain Sebagai Jaminan Utang Piutang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 494-500.

pertimbangan yudisial diberikan terhadap kasus penyalahgunaan keadaan, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa diterapkan dalam praktik peradilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 214/Pdt.G/2014/Pn.JktSel?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tentang jual beli jaminan dalam penyalahgunaan keadaan dalam Kasus Putusan 214/Pdt.G/2014/Pn.JktSel?

Tujuan

Berkaitan dengan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 214/Pdt.G/2014/PN.JktSel, khususnya dalam kaitannya dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dasar pembatalan perjanjian; mengkaji bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan terhadap kasus jual beli jaminan yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, serta mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah dalam hubungan perjanjian; Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan Indonesia serta kontribusinya terhadap perkembangan hukum perdata khususnya dalam bidang kontrak atau perikatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai norma hukum yang membahas mengenai Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*).

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD Tahun 1945), KUHPerdata (BW), Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 214/Pdt.G/2014/PN.JktSel. Selanjutnya, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk melengkapi penjelasan dari bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 214/Pdt.G/2014/Pn.JktSel?

Mahkamah Agung merupakan puncak dari sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, khususnya Pasal 32, yang pada intinya mengatur tentang pengawasan terhadap pengadilan di bawahnya, sehingga wewenang tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, khususnya Pasal 32, yang secara garis besar telah memberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap setiap lingkungan peradilan di bawahnya sekaligus memberikan pedoman yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, sehingga kewenangan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlegitimasi sebagai produk hukum dan biasa dipergunakan sebagai dasar hukum dalam menyusun pertimbangan putusan perkara oleh beragam lingkup peradilan.⁸

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak hanya sekedar dokumen hukum formal. Namun, berfungsi sebagai petunjuk dan arahan operasional dari Mahkamah Agung untuk seluruh unsur dalam sistem peradilan, termasuk hakim, advokat, dan pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, SEMA juga mencerminkan pandangan dan penafsiran hukum tertinggi dari Mahkamah Agung yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan secara signifikan, terutama untuk perkara-perkara yang berpotensi akan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.⁹

Melalui kasus ini, hakim Mahkamah Agung melakukan beberapa pertimbangan sebelum memutuskan sebuah perkara. Pada penanganannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung

⁸ Fatah, M. A. G. (2024). Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. *Transparansi Hukum*, 7(1), 133-137.

⁹ Rihdo, M., Sudur, I. M., Suardi, A. R., Pamungkas, S., & Meilinda, F. P. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230-240.

membuat sejumlah penilaian berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 64/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo. No. 96/Pdt/2008/PT.Smg yang memperlihatkan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding (*Judex Factie*), Surat Kuasa Menjual No. 39 dan No. 41 tertanggal 17 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang berprofesi sebagai notaris, serta Putusan Kasasi No. 1022 K/Pdt/2007.

Pada kasus ini, terdapat tiga jenis gugatan yang diajukan secara berurutan, yaitu provisi, konvensi dan rekonvensi, di mana dalam proses pembuktian di setiap tahapan gugatan dilakukan berdasarkan sanggahan dari penggugat dan tergugat, juga masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti yang berkaitan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan maupun sanggahannya. Proses pemeriksaan yang mendalam, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dokumen dan keterangan saksi, menjadikan Majelis Hakim memperoleh kejelasan yang mendalam mengenai segala aspek perkara sebelum mengambil keputusan, sehingga hal ini memperbesar peluang objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan karena serta memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan dalil-dalil dan membuktikan gugatan masing-masing.

Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, perkara ini sampai pada tahap akhir berupa putusan yang tentunya merupakan perwujudan dari keseluruhan analisis dan penilaian oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas nasib gugatan tersebut, apakah akan ditolak, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, atau dinyatakan tidak dapat diterima, yang mana dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat rekonvensi. Putusan ini menunjukkan keyakinan hakim atas kebenaran dalil-dalil gugatan balik setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dengan menetapkan secara jelas pihak yang bersalah dalam perjanjian dan menerima akibat hukum yang harus ditanggungnya sekaligus dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dengan memberikan pemulihan hak meskipun hanya sebagian. Kemudian, hasil putusan dari hakim dapat menjadi yurisprudensi yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pedoman bagi kasus-kasus serupa di masa yang akan datang dalam menangani perkara-perkara yang memiliki permasalahan hukum yang sama.

B. Penyelesaian sengketa tentang jual beli jaminan dalam penyalahgunaan keadaan dalam Kasus Putusan 214/Pdt.G/2014/Pn.JktSel

Penyalahgunaan keadaan sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis terjadi apabila salah satu pihak berada dalam posisi ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak lainnya, sehingga pihak yang lemah terpaksa untuk menyetujui perjanjian. Sedangkan, penyalahgunaan keunggulan jiwa adalah terjadi dalam situasi dimana terdapat hubungan khusus antara para pihak, dan pihak yang lebih dominan memanfaatkan kondisi tersebut untuk menekankan pihak yang lebih lemah agar menyetujui perjanjian diantara mereka.¹⁰

Perkara Putusan 214/Pdt.G/2014/Pn.JktSel merupakan kasus nyata dari penyalahgunaan keunggulan ekonomis, dimana Tergugat I memanfaatkan kondisi ekonomi Penggugat yang sedang terdesak untuk mengambil alih kepemilikan rumah tinggal milik Penggugat. Hubungan hukum para pihak awalnya hanya berupa utang piutang sebesar Rp 2 miliar berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tertanggal 3 Oktober 2006, dengan jaminan empat buah perhiasan senilai sekitar Rp 1 miliar. Ketika Penggugat mengalami kesulitan melunasi utang, Tergugat I meminta mereka menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas rumah tersebut, disertai kuasa mutlak. Kuasa ini kemudian digunakan Tergugat I untuk secara sepihak membuat Akta Jual Beli (AJB) dan mendaftarkan kepemilikan rumah atas namanya sendiri, tanpa sepengetahuan atau kehadiran Penggugat. Nilai rumah dalam AJB hanya tercantum Rp 950 juta, jauh dibawah nilai pasar aktual yang diperkirakan lebih dari Rp 4 miliar. Dalam kondisi ini, Penggugat tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dan terpaksa menerima syarat yang merugikan. Ketimpangan ini mencerminkan unsur penyalahgunaan keunggulan ekonomis, di mana pihak yang dominan secara ekonomi memanfaatkan keadaan demi keuntungan sepihak

Pada tanggal 9 Februari 2015, dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian. Pengadilan menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi. Selain itu, Sertifikat Hak Milik No. 3770/Petukangan Utara atas nama Lisa Juliana Tanjung yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dinyatakan

¹⁰ R. Fadillah, op.cit

sebagai sertifikat yang sah dan berlaku. Akta Jual Beli (AJB) No. 109 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ny. Sastriany Josoprawiro, S.H., juga dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Demikian pula dengan sejumlah akta lainnya, yaitu Akta Pembatalan No. 42, No. 43, No. 44, serta Akta Pengikatan Jual Beli No. 45, Akta Pengakuan Hutang No. 46, dan Akta Jaminan Fidusia (Barang Bergerak) No. 47, yang keseluruhannya tertanggal 11 Juli 2008, dinyatakan sebagai akta-akta yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat beserta seluruh turunannya.

Hakim juga menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa uang sewa rumah yang belum dibayarkan selama lima tahun, masing-masing sebesar Rp20.000.000,- per tahun, sehingga totalnya mencapai Rp100.000.000,-. Selain itu, para Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk tunduk pada putusan tersebut dan mengosongkan tanah dan bangunan yang berlokasi di Taman Alfa Indah Blok K/29, Petukangan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 3770. Jika tidak dilaksanakan, Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- per hari dihitung sejak pelanggaran terjadi hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun untuk bagian gugatan selebihnya, Pengadilan menyatakan menolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 214/Pdt.G/2014/PN.JktSel menunjukkan adanya pengakuan yuridis terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa salah satu pihak memanfaatkan kondisi ekonomi pihak lain yang terdesak untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dan menjadi preseden penting dalam penerapan asas keadilan dalam sengketa perjanjian.

Saran

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memasukkan penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam KUHPerdata guna memberikan kepastian hukum. Praktisi hukum dan hakim juga diharapkan lebih peka terhadap kondisi ketimpangan antara

para pihak dalam perjanjian. Masyarakat disarankan untuk memahami isi perjanjian secara menyeluruh dan mencari bantuan hukum apabila berada dalam posisi lemah atau tertekan saat membuat perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

- Panggabean, H. P. (1992). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)* (Edisi Revisi). Liberty.
- Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. *“Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 36.
- Fadillah, R., & Fatahillah, F. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2).
- Fatah, M. A. G. (2024). Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. *Transparansi Hukum*, 7(1), 133-137.
- Rahmayani, D. A. (2019). *Tinjauan yuridis penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) perjanjian utang piutang menjadi jual beli tanah (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 192 PK/Pdt/2014)*.
- Rihdo, M., Sudur, I. M., Suardi, A. R., Pamungkas, S., & Meilinda, F. P. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230-240.
- Saija, R. (2016). Penyalahgunaan Keadaan oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 3, 181.
- Saragih, G. C., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Tanah Milik Orang Lain Sebagai Jaminan Utang Piutang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 494-500.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. (1976). (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Trans.). Pradnya Paramita.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 214/Pdt.G/2014/PN.JktSel.